TINJAUAN PERINSISP *ZHENG MING* KONFUSIUS TERHADAP KONTRUKSI KEPEMIMPINAN IDEAL INDONESIA

Raimundus Awur¹, Agustinus Lie², Armada Riyanto³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

awurraimundus6@gmail.com¹, induitevadei@gmail.com², fxarmadacm@gmail.com³

Abstract

The focus of this writing was to review the influence of the concept of "rectification of names" in Confucian thought on the system of government or leadership in Indonesia. This country had a clear system of government. The president was both the head of state and the head of government. In addition to the president as the highest leader, Indonesia also had other leadership bodies. The background of this writing stemmed from the observation that Indonesia's government and leadership system frequently experienced various confusions and often did not operate within its proper framework. Thus, the author aimed to explore Confucian thoughts, specifically the concept of "rectification of names," to envision an ideal direction for leadership and governance. The writing method employed was qualitative, based on a literature review from sources such as relevant books and articles, as well as subjective experiences from personal encounters and lectures. The primary reference figure was Confucius himself.

Keywords: *Indonesia, Leadership, Zheng Ming, Confucius.*

Abstrak

Fokus penulisan ini adalah meninjau pengaruh konsep "penegakan nama" dalam pemikiran Konfusius terhadap sistem pemerintahan atau kepemimpinan di Indonesia. Negara ini merupakan memiliki sistem pemerintahan yang jelas. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain presiden sebagai pemimpin tertinggi, di Indonesia juga memiliki badan kepemimpinan lain. Latar belakang penulisan ini adalah dilihat dari sistem pemerintahan dan kepemimpinan Indonesia yang masih sering mengalami berbagai kerancuan, dan bahkan kerap kali tidak berjalan pada koridornya. Dengan demikian penulis dalam kajian ini ingin mengulas berbagai pemikiran Konfusius, secara khusus tentang konsep "penegakan nama" untuk melihat arah kepemimpinan dan pemerintahan yang ideal. Metode penulisan yang dipakai adalah kualitatif berdasarkan kajian Pustaka dari sumber-sumber berupa buku-buka dan artikel terkait, serta pengalaman subjektif berdasarkan pengalaman dan perkuliahan. Tokoh acuannya adalah Konfusius sendiri.

Kata Kunci: Indonesia¹, Kepemimpinan², Zheng Ming³, Konfusius⁴.

A. PENDAHULUAN

Sitem kepemimpinan merupakan realitas yang tak terelakan. Adalah suatu keniscayaan memisahkahn kepemimpinan dari kehidupan sosial masyarakat 1. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka harus dipimpin. Karena kehidupan manusia juga berkisar seputar problem memimpin dan dipimpin. Seorang ayah, adalah pemimpin bagi keluarganya sebagai kepala keluarga, seorang guru memimpin murid-muridnya, seroang kepala sekolah memimpin guru-gurunya, seorang kepala rumah sakit memimpin rekan-rekannya di rumah sakit, seorang ketua organisasi memimpin anggota kelompoknya, seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan sistem kepemimpinan yang jelas. Presiden menjadi pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial ini diatur dalam pasal 4 UUD 1945. Indonesia juga memiliki sistem demokrasi dengan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah 2. Kepemimpina mereka-mereka yang terpilih berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun itu, banyak drama dan problematik terjadi. Problem-problem yang terjadi bukan saja merugikan bangsa sebagai suatu daerah melainkan lebih lagi karena menlangkahi pri kemanusiaan.

Pelanggaran akan pri kemanusiaan, sangat sering terjadi dari atas. Yakni dari pemimpin atau pemerintah itu sendiri. Sehingga pemimpin yang idela tidak ditemui di sini 3. Dari sebab itu pemerintah menjadi jauh dari perannya yang sesungguhnya. Ambilah contoh Korupsi, kolusi dan nepotisme, atau otoritas yang salah (kepemimpinan otoriter). Tindakan amoral kerap kali terjadi. Bahkan keegoisan dan keuntungan pribadi menjadi tujuan utama seorang pemimpin atau penguasa. Sehingga penegakkan hukum, sistem sosial, pendidikan, dan kemanusiaan (di Indonesia) sangat tidak merata. Misalnya dalam sistem hukum Indonesia. Kerap terdengar selogan “hukum ini, tajam ke bawah dan tumpul keatas.” Dilihat juga dari ketidak merataan ekonomi, kemiskinan dimana-mana, pendidikan yang tidak merata, maupun sarana kesehatan yang masih kurang diberbagai plosok kecil bangsa Indonesia. Indonesia masih menghadapi masalah, terutama dalam bidang hukum dan kepemimpinan. Penegakan hukum di Indonesia belum mencapai tujuan sila Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh

¹ Ainun Najib, *Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia* (2013). hal. 1-3.

² Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif,* 2021, 137–43.

³ Najib, 2023.

Rakyat Indonesia." Sering terjadi keberpihakan yang sewenang-wenang 4. Keadilan adalah keputusan yang benar, tidak memihak, bertanggung jawab, dan memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Penerapan keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui sikap dan tindakan yang adil dan tidak berat sebelah.

Dalam bidang politik dan demokrasi pun nilai kuasa lebih mendominasi daripada nilai kemanusiaan yang solider 5. Solidaritas seakan terabaikan jika kita meninjau politik Indonesia yang berjalan saat ini. Hampir sangat jarang terjadi, terpilihnya seorang pemimpin dari kaum minoritas dalam kepemimpinan Indonesia. Hal ini menunjukkan akan kesadaran solidaritas yang rendah. Dan masih banyak lagi tindakan yang tidak mencerminkan sikap yang solider. Jika kemudian kaum kecil, minoritas atau yang tidak berkepentingan terus-menerus dialienasi dari politik dan sistem kepemimpinan Indonesia, maka demokrasi tidak berjalan sesuai fungsinya. Karena berdasarkan fungsinya demokrasi berarti sebagai suatu penegakan good society (nilai hidup sosial yang baik) sebagai suatu sistem interaksi sosial. Dalam demokrasi terkandung nilai kejujuran (fairness), Merdeka dan bebas (liberty), persamaan (equality), adil (justice), persaudaraan (brotherhood), dan hak individu serta sosial menjadi perangkat dasar nilai demokrasi, dan dimaksudkan demi penegakan hukum sehingga hak asasi manusia terjaga. Hukum ditegakkan agar merealisasikan tujuan yang tercantum dalam UUD. Penegakan hukum mencakup pula penerapan hukum yang selaras dengan kesadaran masyarakat, dan dipengaruhi rasa keadilan mereka 6.

Deskripsi mengenai pemimpin di Indonesia, juga dikenal adanya pembagian kepemimpinan. Pembagian kekuasaan dikenal dengan sebutan Trias Politica yang pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis) tahun 1748, konsep ini dari bahasa Yunani yakni "Tri" yang berarti tiga, As berarti pusat/poros, serta Politica artinya kekuasaan 7. Maka Trias Politica adalah kekuasaan negara berdasarkan tiga pusat/poros, yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Legislatif berarti pembuat undang-undang, Eksekutif melaksanakan undang-undang, dan Yudikatif adalah penafsir undang-undang, yang berhak mengukuhkan pelanggaran undang-undang. berdasarkan UUD 1945 ketiganya memiliki peran masing-masing.

⁴ Bilqis Lantika Putri, "Ketidakadilan Penegak Hukum Di Indonesia," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, no. January (2022): 1–17.

⁵ Arbi Sanit, "Pematangan Demokrasi Dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan Dan Kepemimpinan," *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>.

⁶ Gieska Ayu Meutia et al., "Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2022): 19–24.

⁷ Tri Mulyani Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945" 18 (2016): 328–38.

Dalam penelitian terdahulu disebutkan perihal kepemimpinan di Indonesia, bahwa Indonesia merupakan negara dengan pluralitas yang tinggi, dengan beragam macam suku, bahasa, agama, maupun budaya. Sebab itu, Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang bersifat terbuka, pluralistik, humanis, merakyat, agar tercapailah kebahagiaan, makmur dan sejahtera⁸. Kemakmuran ini hanya akan tercapai bila sistem, pemerintahan dan kepemimpinan di Indonesia berjalan sesuai dengan peran masing-masing tanpa melampaui batas, “tahu batas diri”. Konsep “penegakan nama” Konfusius akan menjadi pemandu dalam melahirkan prinsip hidup yang baik dan menawarkan paham bahwa pada hakekatnya manusia adalah baik. Karena manusia adalah baik, maka mengenai segala kekeliruan, kerancuan, keterpurukan hidup, atau mengenai problem-problem kemanusiaan yang terjadi hanyalah suatu kecelakaan yang menimpah prinsip hidup manusia. Karena keterbatasan paham dan pengetahuannya⁹. Dengan dan melalui pengetahuan, manusia akan terbantu untuk bertindak. Jika tindakannya baik, maka pengetahuannya baik, dan sebaliknya bila tindakannya buruk maka ia sedang dilanda keburukan dari pengetahuannya.

Kehidupan sosial masyarakat kehilangan peraturan baik dalam hubungan seroang dengan yang lain. Dengan itu, Konfusius menawarkan konsep zheng Ming 10 untuk menyelamatkan situasi masyarakat yang kacau-balau. Konfusius akan menawarkan pengetahuan, konsep, atau pemikiran agar terciptanya kehidupan manusia yang unggul. Manusia yang berperan sesuai “nama”, sesuai dengan moral kemanusiaan. Kemunduran maupun kemajuan suatu negara atau bangsa dan bahkan berbagai tatanan sosial bergantung pada siapa yang memimpin dan bagaimana sikap kepemimpinannya.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam dan menyeluruh. Metode ini menekankan interpretasi, pemahaman konteks, dan kompleksitas situasi atau peristiwa¹¹. Pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks, bertujuan mengungkap pola, tema, atau makna. Metode kualitatif cocok untuk penelitian yang kompleks dan subjektif,

⁸ Najib, 2023.”

⁹ H. G. Erel, *Alam Pemikiran Cina Sejak Konfusius Sampai Mao Zedong*, 2nd ed. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990).

¹⁰ C. Dewi Hartati, “Pemikiran Konfusius Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Budaya Bangsa Tionghoa,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2021): 15–38.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, pertama (ALFABETA Bandung), 2022.

serta mengeksplorasi pandangan, sikap, dan pengalaman individu atau kelompok. Penulis menggunakan analisis teks/kajian pustaka yang sering digunakan untuk memahami teori-teori, temuan penelitian sebelumnya, dan literatur relevan lainnya, guna membangun pemahaman mendalam tentang topik penelitian, mengidentifikasi celah pengetahuan, serta mendukung analisis dan interpretasi data dari teknik kualitatif lainnya

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Pemikiran Konfusius dan Konsep Penegakan Nama (Zhèngmíng)

Kong Fuzi (Konfusius) merupakan filsuf besar Cina yang muncul sekitar tahun 551-479 SM, bersamaan dengan masa kepemimpinan Dinasti Zhou barat (722-221 SM)¹². Hadirnya pemikiran-pemikiran Konfusius dan berpa pemikir lainnya, karena timbulnya berbagai krisis sosial-politik yang terjadi. Mereka hadir untuk menemukan jalan keluarnya. Sebelum Konfusius, peradapan hidup Cina, berupa sistem hukum, peraturan, sopan santun, etika, moral, sistem pergaulan dan tingka laku, sudah ada sejak dintsati Zhou (1027-256 SM). Tetapi Ketika dinasti tersebut melemah timbulah berbagai raja-raja kecil dari penglima-panglima daerah sehingga pembangkangan terjadi dimana-mana di wilaya masing-masing. Kondisi negara menjadi serba tidak menentu. Dan ini kemudain terkenal sebagai jaman “musim semi dan gugur” (Chun-qiu) (722-481 SM). Latar belakang pemikiran konfusius, ialah peperangan dan penindasan. Karena arogansi setiap pemimpin, mau menunjukkan kekeuatan mereka. Suasana semakin kacau dan tidak adanya kedamaian. Maka mulailah muncul pemikiran-pemikiran bijak para pemikir waktu itu, dan juga muncul pula seruan-seruan puitis yang mengutamakan moral dan kemanusiaan. Salah satu yang terkenal dari seruan puitis tersebut adalah dari Kong Fuzi (Konfusius). Dalam situasi Masyarakat yang cukup genting, perpecahan yang terus terjadi, dan maraknya kecurigaan antar pemimpin munculah Konfusius, yang karena ajarannya mulai tumbuh kebudayaan moral di Cina, bahkan di kemudian hari menjadi sumber keberadapan budaya di berbagai bangsa di Asia Timur dan Tenggara. Menurut Konfusius, ketentraman antara Masyarakat dan pemerintah hanya akan terjadi dan tumbuh bila semua mau mengoreksi diri dan mau menghindari pebuatan bercela, serta bertindak sesuai kemampuan masing-masing tanpa melampaui batas.

¹² Mohamad Asruchin, “Konfusianisme: Sumber Peradaban China,” *The First International Seminar & Roundtable Meeting “Professional Chinese Teaching” in Southeast Asia*, 2018, 75–76.

Inti pemikiran atau ajaran Konfusius adalah mengenai pengaturan akan etika moral dalam hubungannya dengan status masing-masing orang. Setiap manusia menurut Konfusius memiliki tugas dan peran masing-masing sesuai dengan “Namanya”. Dalam moral Konfusianisme menekankan berapa sikap bijak manusia, seperti; Kemanusiaan (Ren), Kebajikan/Keadilan (Yi), Tata Aturan (Li), Pengetahuan (Zhi), Integritas (Xin), Kesetiaan (Zhong), Hormat Kepada Orang Tua (Xiao), Rasa Malu (Chi), Baik Budi (Liang), Kejujuran (Cheng), Bersikap Ksatria (Wen), Sikap Pemaaf (Shu) dan Penegakan Nama/menyesuaikan diri (Zheng ming), 13. Dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan konfusius menekankan agar pemerintah atau pemimpin harus bertindak berdasarkan kemanusiaan (Ren) dan keadilan (Yi), dengan tidak melupakan berapa prinsip hidup moral yang telah disebutkan tadi. Moralitas adalah fondasi untuk kehidupan yang harmonis dan damai.

Dalam bidang politik, Konfusius memiliki pandangan yang kuat tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memimpin dengan moralitas dan menjadi teladan bagi rakyatnya. Pemimpin yang baik adalah mereka yang adil dan memperlakukan semua orang dengan sama, tanpa diskriminasi. Pemerintahan yang adil dan bermoral, menurut Konfusius, akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Konfusius juga menekankan pentingnya memahami filsafat hidup dan berusaha mencapai harmoni serta keseimbangan. Baginya, menemukan makna dalam hidup adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Ini dapat dicapai melalui praktik dan pengamalan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Harus mengutamakan pentingnya keseimbangan, kejujuran, obyektivitas, kesopanan, dan sikap tulus dalam segala hal. Esensi dari ajaran ini adalah menghindari sikap berlebihan dan selalu bersikap supel dan tulus. (Isi dari Doctrine of the Mean) 14. Atau memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, memahami situasi dan orang lain untuk mencapai keberhasilan, berpikir jernih sebelum bertindak, dan berpikir realistis dengan tidak mengharapkan hasil yang tidak mungkin. Secara keseluruhan, "Doctrine of the Mean" membantu kita memahami pentingnya bertindak dengan cerdas dan bijaksana dalam hidup, serta memperlakukan orang lain dengan cara yang tepat dan adil. Ajaran ini mengajarkan bahwa dengan menjaga keseimbangan dan kejujuran, serta berperilaku sopan dan tulus, kita dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan bermakna. Selain itu diperlunya juga prinsip penegakan nama (Zheng Ming).

¹³ Asruchin.

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Sejarah Filsafat Tiongkok, Sebuah Pengantar Komperhensif* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010).

Zheng ming atau penegakkan nama adalah ketika seorang mengenal/mengetahui perannya berdasarkan status, dalam hubungannya dengan orang lain di kehidupan sosial—Masyarakat. (Agustinus Lie, PPT 2024). Dengan Zheng Ming orang akan bertindak sesuai dengan “namnya”. Nama dalam artina bukanlah nama subyektif, untuk panggilan seseorang. Seperti paham akan nama diri, misalnya: Budi, Tomi, Jhon, Markus, dan lain-lain, melainkan lebih pada nama dalam artina status atau fungsi dan posisi diri seseorang dalam hubungannya dengan yang lain. Dengan mengedepankan moral-etika kemanusiaan. Karena pada koadratnya manusia adalah baik 15.

Konfusius merupakan seorang tokoh penting yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan kebudayaan 16. Ia dikenal sebagai orang pertama yang menjadikan pendidikan sebagai profesi, sehingga mengangkat pendidikan menjadi bagian integral dari kebudayaan dan institusi sekolah. Melalui upayanya, Konfusius menciptakan kelompok profesional baru yang tidak terdiri dari petani, seniman, pedagang, atau pejabat, melainkan guru dan pendidik. Selain itu, Konfusius juga dikenal sebagai pelopor dalam penerapan ujian negara sebagai syarat untuk menjadi pejabat pemerintah. Kontribusinya ini telah memberikan dampak yang mendalam dan bertahan lama dalam struktur sosial dan pendidikan di Tiongkok dan sekitarnya. Sistem etika—moral merupakan kekhasan pemikiran konfusius dan cakupannya cukup luas yakni di bidang filsafat sosial—politik, sosial dan pendidikan. Idealisme sosialnya (utopia) adalah menciptakan masyarakat bermoral melalui pendidikan kepada rakyatnya agar menjadi "Junzi" (manusia unggul), dan dengan demikian menciptakan tatanan sosial yang baik. Sistem ini dapat terus diterapkan sampai tatanan sosial tercipta.17 Ketika terciptanya tatanan sosial yang baik maka SDM sebagai fokus utama akan tercapai.

Untuk mencapai moralitas dan berjalannya struktur ketatanegaraan yang baik, sehingga terbentuk masyarakat yang bermoral, diperlukan pengembalian tatanan dalam masyarakat. Sangat penting bahwa kaisar tetap berperan sebagai kaisar, bangsawan menjalankan perannya sebagai bangsawan, menteri bertindak sesuai dengan peranannya sebagai menteri, dan rakyat berperilaku sebagai rakyat. Inilah yang disebut sebagai “Penegakan Nama”. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menegakkan nama-nama tersebut. Jika nama tidak sesuai, maka

¹⁵ Kristan, *Pemikiran Politik Konfusius, Mencius Dan Xunzi, Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2015.

¹⁶ Hartati, “Pemikiran Konfusius Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Budaya Bangsa Tionghoa.”

¹⁷ Ari Cahyo Nugroho, “Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik),” *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021): 185–94, <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>.

kata-kata tidak akan mencerminkan kenyataan; jika kata-kata tidak mencerminkan kenyataan, maka tidak ada yang akan terwujud. Jika tidak ada yang terwujud, maka upacara dan musik tidak akan berkembang (Agustinus Lie, PPT 2024).

Kepemimpinan Pemerintah dan Perannya Yang Ideal Menurut Konfusius

Pemimpin menurut Konfusius adalah pemegang “mandat dari langit.” Dalam artian kekuasaan dan kepemimpinannya bukan semata-mata karena usahanya sendiri, karena kekuatannya sendiri. Melainkan suatu pemberian kepercayaan dari rakyat. Karenanya itu, mandat tersebut dapat dicabut bila pemerintah/penguasa atau pemimpin itu tidak bersikap bijak dalam menuntun rakyatnya. Kebijakan pemimpin dalam kemasyarakatan akan tampak bila ia mengedepankan kemanusiaan dan etika-moral hidup bersama. Segala sesuatu cukup untuk semua orang, dan adil dalam segala hal, baik ekonomi, sosial politik, keselamatan dan perlindungan masyarakat menjadi hal utama. Dan kejujuran dalam kepemimpinannya harus nyata dan terbuka. Sehingga stabilitas kepemimpinan akan terjadi dan mampu menjadi kepercayaan Masyarakat.

Konfusius membahas lima hubungan manusia sebagai acuan untuk tata hubungan sosial-masyarakat, yaitu antara: Raja atau Penguasa dengan rakyatnya, ayah dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, dan teman. (Agustinus Lie, PPT 2024). Dalam hubungan ini, yang lebih muda atau memiliki status sosial lebih rendah harus hormat dan setia kepada yang lebih tua, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara, termasuk menghormati leluhur yang telah meninggal. Sebaliknya, yang lebih tua atau senior harus bersikap adil, bijaksana, dan memperhatikan nasib juniornya. Menurut Konfusius, kedamaian dalam pemerintahan dan masyarakat tercapai jika setiap individu introspeksi dan memperbaiki perilaku tercela, mengatur hal-hal dengan proporsional, dan bertindak sesuai kapasitas serta kemampuan. Mereka yang berperilaku sesuai moral ajaran Konfusius disebut Jun-zi (Gentleman/Orang Bijak), sementara yang mengingkarinya disebut Xiao-ren (Orang Rendah Budi).

Penekanan akan ajaran moral Konfusius, mengatur hubungan manusia, agar bertindak dan menjalani kehidupan sesuai tugas masing-masing, dan statusnya masing-masing menjadi kunci agar kehidupan dan prinsip dasar manusia tidak hilang. Pada dasarnya manusia adalah baik, dan kebaikan manusia merupakan pemberian dari “Tian” yang sejak awal sudah ada dalam dirinya. (Agustinus, PPT, 2024). Dengan berbagai sikap terpuji yang telah diutarakan Konfusius, akan sangat membantuh Masyarakat dan pemimpinnya menghindari kekacauan dan kerancuan dalam tatanan hidup sosial-masyarakat. Konfusius pernah mengatakan; “jangan

melakukan suatu hal kepada orang lain, dimana anda juga tidak mau menerima perlakuan seruapa terjadi pada anda”. Demikian dalam kepemimpinan, utamakan kemanusiaan dan keadilan, gunakan aturan dengan sebaiknya, gunakan pengetahuan untuk mengejar hal-hal baik, tetap memiliki rasa dan sikap hormat seorang akan yang lain, tetap berwibawah dan berani, baik budi dan jujur 18. Jadilah pemimpin yang berpribadi-kesatria dan mampu memaafkan dengan bijak serta menyesuaikan diri dengan status yang dimiliki. Statstus sebgai mandat, harus dijaga agar tidak menjadi tercemar di hadapan orang lain dan juga harus menjadi penting bagi diri sendiri dan sesama.

Pemerintah adalah orang terhormat, dan orang terhormat harusnya menghargai orang yang dapat dipercaya. Dan tidak berpikir picik. Berpikir picik bertati tidak menjunjung tinggi Kebajikan. Padahal Kebajikan sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat 19. Oleh konfusius menyebutkan bahwa; “Kebajikan dan kebaikan melampaui kebutuhan akan api dan air. Katanya: saya pernah melihat orang mati karena air dan karena api tetapi tidak pernah melihat mereka mati karena Kebajikan dan kebaikan.” Maka, pemimpin dalam kepemimpinannya menurut konfusius harus berpikir baik daripada picik. Karena orang yang berpikir picik tidak dapat melaksanakan tugas besar. Dalam pelaksanaan tugas yang besar, pemimpin seharusnya memerintah dengan kesadaran, tidak membuat yang lain menderita, tidak akan jadi perselisihan, bekerja sama dan saling menjunjung.

Secara istimewa pemikiran Konfusius tentang politik adalah, keutamaan akan penyempurnaan sikap dan perilaku seseorang akan menjadi pimpinan atau pemerintahan yang berkuasa 20. Kekuasaan dan kepemimpinan akan percuma tanpa Kebajikan. Dengan Kebajikan-kebajikan tersebut, manusia akan terarah pada kehidupan lebih unggul, atau disebut juga manusia unggul. Kepemimpinan yang unggul pun adalah bilah kemanusiaan unggul tercapai. Capaian akan hal itu menunjukkan bahwa pemimpin tersebut adalah seorang yang pandai. Kepandaian seorang pemimpin akan terpelihara hanya dengan kebajikannya. Tetapi tidak cukup dengan Kebajikan pula jika kepemimpinan itu diperoleh dari kepandaian dan talenta seseorang melainkan juga diperlukan sikap dan tanggungjawab dalam memegang jabatannya. Karenaa jika tidak bertanggung jawab ia akan kehilangan rasa hormat dari orang

¹⁸ Hartati, “Pemikiran Konfusius Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Budaya Bangsa Tionghoa.”

¹⁹ Anand Krishna, *Mengikuti Irama Kehidupan; Tao Teh Ching Bagi Orang Modern*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia, 1998).

²⁰ Kristan, *Pemikiran Politik Konfusius, Mencius Dan Xunzi*.

banyak 21. Dengan demikian Kebajikan atau kebaikan dan tanggungjawab harus sejalan dalam kepemimpinana. Pemimpin yang baik mengutamakan Kebajikan bersama dalam tatanan sosial Masyarakat, ia tidak mengutamakan imbalan dan tetap bersikap hormat dalam menjalankan tanggungjawabnya. Buah dari kepemimpinan yang baik adalah terciptanya manusia unggul (Junzi). Perhatian pemikirannya Konfusianisme menekankan bagaimana belajar menjadi manusia yang sebenarnya, berdasarkan koadratnya.²² Koadrat baik manusia berlaku juga dalam sistem kepemimpinan dan pemerintahan, maka ketika pemimpin menyadari koadratnya yang baik, ia akan dengan baik pula bertindak dan berperilaku dalam memimpin. Kepemimpinannya akan terarah pada kebaikan sebagaimana layaknya manusia berhakekat baik. Karena hakekatnya baik segala kecenderungan pada kerancuan kepemimpinan harusnya tidak ada, tidak ada kepemimpinan yang Oligarki, tidak ada pemimpin yang otoriter, tidak ada yang pemimpin yang egois dengan terus berlaku, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kepemimpinan yang ideal, menurut pandangan Konfusianisme, sangat erat kaitannya dengan konsep penegakan nama dan perilaku yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing individu. Kesadaran akan diri dan kepemimpinan merupakan keutamaan. Sadar dari seorang pemimpin yang ideal harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap aspek pemerintahannya. Ini berarti bahwa pemimpin harus memiliki integritas, keutamaan moral, dan komitmen untuk kebaikan bersama. Dalam hubungannya dengan yang dipimpin, pemimpin yang ideal harus memperlihatkan sikap dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Pertama, pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya, dengan tindakan dan keputusan yang mencerminkan keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Dengan menunjukkan perilaku yang patut dicontoh, pemimpin dapat menginspirasi rakyat untuk mengikuti jejaknya. Kedua, pemimpin harus bertindak adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa memihak, dan menghargai hak-hak setiap individu. Keadilan dalam pemerintahan akan menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat dari rakyat. Ketiga, pemimpin harus memiliki empati dan peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, serta berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemimpin yang peduli akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berdampak positif pada kehidupan rakyat.

²¹ Jeffrey Seow, *Literatur Lengkap Ajaran Konfusius*, ed. Lyndon Saputra (Batam: Lucky Publishers, 2002).

²² Hartati, "Pemikiran Konfusius Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Budaya Bangsa Tionghoa."

Keempat, kepemimpinan yang baik memerlukan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan, dengan pemimpin yang bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya dan bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan. Transparansi akan menciptakan kepercayaan antara pemimpin dan rakyat. Kelima, pemimpin yang ideal harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan potensi individu sehingga masyarakat menjadi lebih produktif dan berdaya saing. Terakhir, pemimpin harus mampu membangun rasa kebersamaan dan persatuan di antara rakyatnya melalui promosi nilai-nilai bersama dan dialog yang konstruktif. Persatuan akan memperkuat stabilitas sosial dan politik. Seorang pemimpin yang efektif adalah individu yang dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk mendorong pengikutnya mencapai kinerja yang memuaskan.²³ Para pemimpin memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan atau kekuatan dalam mempengaruhi perilaku bawahan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Hubungan Kepemimpinan dengan “Yang lian” Selaras Penegakan nama

Dalam hubungannya dengan orang lain, seorang pemimpin atau pemerintah harus memiliki sikap dan tindakan yang selaras dengan tugas-tugasnya. Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, dan pemimpin harus memosisikan dirinya sebaik mungkin untuk menjalankan peran tersebut dengan efektif dan bijaksana. Pemimpin memberikan sedikit arahan namun banyak dukungan, membuat keputusan bersama dan mendukung pekerjaan yang dipimpin dalam menyelesaikan tugas. Sebaliknya, ada pemimpin yang memberikan sedikit dukungan dan arahan, menyerahkan atau mendelegasikan keputusan dan tanggung jawab kepada yang dipimpin. Teori yang terkait dengan gaya kepemimpinan ini adalah Teori Kepemimpinan Grid, yang fokus pada hubungan/relasi dengan mengadakan komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin,²⁴ sehingga timbul pengaruh terhadap komitmen terhadap organisasi. Konfusius memiliki pandangan sendiri bila ia menjadi seorang pemimpin suatu kelompok, organisasi atau negara.

Dalam suatu kesempatan berdiskusi dengan muridnya yang bernama Zilu, Konfusius mengemukakan pandangannya tentang pentingnya "penegakan nama-nama" dalam konteks

²³ Ni Putu Depi Yulia Peramesti and Dedi Kusmana, “Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial,” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2018, 73–84, <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.413>.

²⁴ Leni Sriharmiati, “Relasi Kepemimpinan Dan Komunikasi Dengan Motivasi Kerja Di DKI Jakarta,” *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 1, no. 1 (2017): 21–29.

pemerintahan. Ketika ditanya bagaimana seandainya ia menjadi seorang pemimpin, Konfusius menjawab, "Pertama-tama, saya akan memastikan bahwa nama-nama sudah benar 25. Jika nama-nama tidak benar, maka pembicaraan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, dan sebagai akibatnya, segala urusan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik, kesusilaan dan musik tidak akan berkembang. Jika kesusilaan dan musik tidak berkembang, hukum tidak akan dapat ditegakkan dengan tepat. Dan jika hukum tidak dapat ditegakkan dengan tepat, maka rakyat akan kehilangan pijakan untuk menjalani kehidupan mereka." Dalam perjalanan kehidupan Konfusianisme memiliki konsep Zheng Ming yang sangat berpengaruh.

Pandangan Konfusius mengenai Zheng Ming ini berakar dari konteks politik negara Wei, dan digunakan sebagai dasar penyusunan disiplin politik. Lebih lanjut, Konfusius menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, setiap golongan harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan tepat. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam pencapaian tujuan organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang efektif, tujuan sulit tercapai. Pola kepemimpinan berperan penting dalam meningkatkan kinerja anggota. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja individu berasal dari gaya dan penampilan kepemimpinan. Hubungan antara pemimpin dan anggota bersifat saling tergantung namun tidak seimbang, di mana anggota biasanya lebih bergantung pada pemimpin.²⁶ Dalam interaksi ini, terjadi saling mempengaruhi, dengan pemimpin berusaha mengarahkan perilaku anggota sesuai harapannya. Interaksi ini menentukan keberhasilan pemimpin dalam organisasi. Pemimpin/pemerintah harus menjalankan perannya sebagai pemerintah, para menteri harus melaksanakan tugasnya sebagai menteri, dan dalam keluarga, ayah dan anak harus menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan peran masing-masing.

Konfusius menekankan bahwa ketepatan dan kebenaran dalam penggunaan nama-nama serta peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam struktur sosial dan politik adalah fondasi yang esensial untuk mencapai keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Pemikiran Konfusius tentang "penegakan nama-nama" tidak hanya penting dalam konteks struktur pemerintahan, tetapi juga dalam hubungan antara pemerintah atau pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Konfusius percaya bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki

²⁵ Kristan, *Pemikiran Politik Konfusius, Mencius Dan Xunzi*.

²⁶ Kiki Rahayu, Tonny D. Pariela, and Pieter H. Manuputty, "Kepemimpinan Dan Stabilitas Relasi-Relasi Sosial Di Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon," *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi* 5, no. 2 (2023): 128–36, <https://doi.org/10.30598/komunitasvol5issue2page128-136>.

peran dan tanggung jawab yang jelas dan spesifik, yang jika dijalankan dengan benar, akan menciptakan harmoni dan stabilitas (Agustinus, PPT, 2024). Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, konsep "penegakan nama-nama" dapat diterapkan sebagai berikut; seorang pemimpin harus menjalankan perannya dengan integritas dan adil. Pemimpin yang baik harus memberi contoh yang benar, bertindak dengan kebijaksanaan, dan memastikan bahwa keputusannya mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ketika pemimpin bertindak sesuai dengan perannya, rakyat akan merasa dihargai dan diayomi, sehingga mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memenuhi perannya dengan baik misalnya, bertindak sewenang-wenang atau tidak adil, maka kepercayaan rakyat akan tergerus, dan kesetiaan mereka terhadap pemerintah akan melemah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan dalam masyarakat.

Konteks yang lebih luas, prinsip "penegakan nama-nama" juga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan transparan antara pemerintah dan rakyat dalam berrelasi. Kepemimpinan berbasis relasi mengacu pada model atau perspektif yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan terletak pada kemampuan pemimpin untuk menciptakan hubungan positif melalui komunikasi dalam organisasi. Sesuai namanya, kepemimpinan ini melibatkan koneksi antarindividu.²⁷ Kepemimpinan berbasis relasi menegaskan bahwa kepemimpinan adalah proses komunikatif di mana sekelompok orang bekerja bersama untuk mencapai perubahan positif. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada rakyat akurat dan dapat dipercaya. Ini akan membantu rakyat memahami kebijakan dan keputusan pemerintah, serta merasa terlibat dalam proses pemerintahan. Pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai moral tinggi akan menginspirasi rakyat untuk melakukan hal yang sama. Ketika moralitas dan etika dijunjung tinggi dalam pemerintahan, hukum akan ditegakkan dengan lebih tepat dan adil, menciptakan lingkungan di mana rakyat merasa aman dan terlindungi. Dengan demikian, "penegakan nama-nama" menurut Konfusius menciptakan dasar bagi hubungan yang sehat dan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Ketika setiap individu dalam masyarakat memahami dan menjalankan perannya dengan benar, keseluruhan struktur sosial akan berfungsi dengan baik, menghasilkan masyarakat yang stabil, makmur, dan Sejahtera. Penegakan nama adalah langkah pertama dalam membangun tatanan sosial.

²⁷ Rita Anggorowati et al., "Peran Komunikasi Kepemimpinan Pendidikan Dalam Membangun Relasi Educational Leadership Communication ' s Role In Relationship Building," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 21, no. 3 (2021): 9–16.

Nama-nama tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga preskriptif, artinya mereka menetapkan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang menyandang nama tersebut. Dalam tatanan masyarakat, Konfusius membaginya menjadi lima hubungan utama (wu lun);²⁸ pemimpin dan rakyat, ayah dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, serta teman-teman. Dalam setiap hubungan ini, pihak pertama (pemimpin, ayah, suami, kakak, dan teman) harus menerapkan kebenaran, perhatian, kebaikan, kemurahan hati, dan kelembutan. Sebaliknya, pihak kedua (rakyat, anak, istri, adik, dan teman) harus menunjukkan kesetiaan, ketaatan, dan penghormatan.

Demikian juga kepemimpinan, dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin mencerminkan prinsip-prinsip ini. Seorang pemimpin yang baik harus bertindak dengan adil, penuh perhatian, dan kebijaksanaan, menjadi teladan moral bagi rakyatnya. Pemimpin harus memahami bahwa perannya bukan hanya memerintah tetapi juga melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, rakyat diharapkan menunjukkan kesetiaan, ketaatan, dan penghormatan kepada pemimpin mereka, asalkan pemimpin tersebut memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Konfusianisme menekankan pentingnya setiap individu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai moral yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang didasarkan pada integritas dan keutamaan moral, yang tidak hanya memerintah tetapi juga melayani dan memberdayakan. Dalam hubungan yang saling menghormati ini, tatanan sosial dapat terjaga dengan baik, menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam Masyarakat.

Kepemimpinan Di Indonesia Yang Ideal

Pemahaman tentang terminologi "pemimpin" mencakup proses yang bertujuan untuk membimbing atau mempengaruhi individu atau kelompok agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini juga melibatkan upaya pengarahan yang dapat memengaruhi aktivitas orang lain. Dalam konteks Indonesia, proses memilih pemimpin yang ideal harus memperhatikan beberapa syarat penting untuk memastikan kualitas kepemimpinan yang baik dan efektif. Pertama, pemilihan pemimpin harus dilakukan secara adil, tanpa dipengaruhi oleh pemberian, hubungan kekerabatan, atau kepentingan pribadi lainnya. Pemimpin harus dipilih berdasarkan karakter dan kepribadian yang memenuhi syarat sebagai pemimpin, seperti integritas, kejujuran, dan kemampuan untuk memimpin. Kedua, rakyat harus memiliki

²⁸ Ereel, *Alam Pemikiran Cina Sejak Konfusius Sampai Mao Zedong*.

pengetahuan yang tajam tentang siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kualitas dan rekam jejak para kandidat. Ketiga, rakyat harus memiliki pandangan dan kebijakan yang objektif dalam menilai siapa kandidat yang lebih kuat dan pantas untuk membawa kemaslahatan bagi negara dan bangsa. Pemimpin yang dipilih harus mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang ideal harus bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun formal. Mereka harus memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk bertanggung jawab atas amanah jabatan yang dipercayakan kepada mereka. Tanpa tanggung jawab, roda kepemimpinan akan rusak dan berdampak negatif pada struktur pemerintahan, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan.²⁹

Dari konsep Zheng Ming dari Konfusianisme, pentingnya penegakan nama dalam kepemimpinan menekankan bahwa setiap individu harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan. Dalam konteks kepemimpinan Indonesia, ini berarti bahwa pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan keutamaan moral, sesuai dengan harapan dan norma masyarakat. Kepemimpinan yang efektif dan efisien tercapai dengan menjalankan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin harus terlibat dalam dinamika kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Dalam mencapai tujuan dan fungsi kepemimpinan secara internal, akan terjadi aktivitas kepemimpinan yang beragam, yang memperlihatkan pola kepemimpinan yang berbeda-beda dengan kepentingan meritokrasi³⁰. Meritokrasi adalah sebuah sistem atau prinsip di mana individu diberi posisi, penghargaan, dan kesempatan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi mereka, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti keturunan, kekayaan, atau status sosial³¹. Dalam sistem meritokrasi, penilaian terhadap seseorang didasarkan pada seberapa baik mereka melakukan tugas atau sejauh mana mereka memiliki kompetensi yang relevan, sehingga mendorong keadilan dan efisiensi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pemerintahan. Dengan demikian, pemimpin yang benar-benar bijaksana dan bertanggung jawab akan mampu membawa harmoni dan kesejahteraan bagi bangsa, menghindari kekacauan, dan menjaga stabilitas sosial dan politik.³² Dalam sistem

²⁹ Najib, "Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia."

³⁰ Besse Mattayang, "Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis," *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting* 2, no. 2 (2019): 45, <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.247>.

³¹ Yohanes Alfrid Aliano and F X Eko Armada Riyanto, "Pemulihan Martabat Manusia Dalam Perspektif Metafisika Persahabatan," *Jurnal FilsafatIndonesia*, Vol 5 No 5, no. 2 (2022): 162–72.

³² Kristan, *Pemikiran Politik Konfusius, Mencius Dan Xunzi*.

kepemimpinan Indonesia, prinsip-prinsip ini harus diterapkan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar layak dan mampu mengayomi rakyat. Hanya dengan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang kuat dan tanggung jawab yang tinggi, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera

Konsep Zheng Ming, menekankan pentingnya setiap individu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan nama atau status yang disandangnya. Penerapan konsep ini dapat digunakan untuk menilai penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, terutama dalam konteks adanya kerancuan politik dan sistem kepemimpinan yang terjadi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme³³. Trias Politica, yang memisahkan kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bertujuan untuk menciptakan checks and balances sehingga tidak ada satu pun lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Dalam konteks Zheng ming, setiap lembaga dalam sistem Trias Politica harus menjalankan perannya dengan tepat dan sesuai dengan fungsinya. Eksekutif harus menjalankan tugas pemerintahan, legislatif harus membuat dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif harus menegakkan hukum dengan adil.

Indonesia sering menghadapi kerancuan dalam penerapan Trias Politica, ditandai maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kerancuan ini terjadi saat pejabat dan institusi tidak menjalankan peran sesuai norma. Misalnya, korupsi atau kolusi antara legislatif dan eksekutif, atau yudikatif yang tidak adil karena intervensi. Menurut Zheng ming, hal ini terjadi karena pejabat mengabaikan tanggung jawab moral dan etika. Untuk memperbaiki, diperlukan penegakan norma yang kuat, dimana setiap pejabat memahami dan menjalankan tugas dengan integritas dan nilai moral tinggi. Dengan penegakan nama, pemimpin dan pejabat akan lebih bertanggung jawab dan berintegritas dalam menjalankan tugas mereka. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya mengikuti aturan secara formal tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai etika yang mendasari tugas tersebut. Misalnya, seorang anggota legislatif harus benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Eksekutif harus fokus pada pelayanan publik dan bukan pada keuntungan pribadi. Yudikatif harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan bebas dari tekanan eksternal³⁴. Dengan demikian, penerapan konsep Zheng ming dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia

³³ Oleh Dr Alexander et al., "Sambut Dan Jaga Keutuhan Indonesia 2045: Revolusi Kembali Ke Sistem Ekonomi Pancasila & Tolak Sistem Ekonomi Neoliberal," 2021.

³⁴ Yustinus Alphonsus Tjatur, Paulinus Yan Olla, "Mengabdikan Tuhan Dan Mencintai Liyan : Penghayatan Agama Di Ruang Publik Yang Plural," *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana* 27 seri no (2017): 111,112.

dapat memperbaiki kerancuan politik dan sistem kepemimpinan yang ada, mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan bahwa prinsip Trias Politica dijalankan dengan benar untuk mencapai pemerintahan yang bersih, adil, dan efektif. Efektivitas kepemimpinan dalam terang ini adalah mengedepankan moral kemanusiaan dan keadilan. Sehingga apapun sistemnya jika dijalankan dengan penegakan nama yang tepat akan tercapai kesejahteraan bersama dalam kehidupan sosial-masyarakat yang plural.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Jadi, konsep Zheng ming Konfusianisme penting untuk kepemimpinan dan pemerintahan. Konsep ini menekankan peran dan tanggung jawab sesuai status sosial, serta integritas, moralitas, kejujuran, dan keadilan. Dalam pemerintahan Indonesia, penerapan Zheng ming dapat memperkuat prinsip Trias Politica dan mengatasi masalah politik serta korupsi. Pemimpin harus berkomitmen pada prinsip moral dan etika, menunjukkan tanggung jawab moral dalam tindakan mereka. Dengan penegakan norma moral yang kuat, kepemimpinan ideal akan membawa harmoni, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, menjadikan kehidupan sosial lebih damai dan makmur

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Oleh Dr, Jebadu Dosen, Sekolah Tinggi, Filsafat Katolik, Ledalero-Flores Kunci Supaya, Tetap Utuh, and Bisa Sejahtera. "Sambut Dan Jaga Keutuhan Indonesia 2045: Revolusi Kembali Ke Sistem Ekonomi Pancasila & Tolak Sistem Ekonomi Neoliberal," 2021.*
- Aliano, Yohanes Alfrid, and F X Eko Armada Riyanto. "Pemulihan Martabat Manusia Dalam Perspektif Metafisika Persahabatan." Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 5 No 5, no. 2 (2022): 162–72.*
- Anggorowati, Rita, Aan Komariah, Johar Permana, Diding Nurdin, and Eka Prihatin. "Peran Komunikasi Kepemimpinan Pendidikan Dalam Membangun Relasi Educational Leadership Communication 's Role In Relationship Building." Jurnal Penelitian Pendidikan 21, no. 3 (2021): 9–16.*
- Asruchin, Mohamad. "Konfusianisme: Sumber Peradaban China." The First International Seminar & Roundtable Meeting "Professional Chinese Teaching" in Southeast Asia, 2018, 75–76.*

-
- Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945" 18 (2016): 328–38.
- Ereel, H. G. *Alam Pemikiran Cina Sejak Konfusius Sampai Mao Zedong*. 2nd ed. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990.
- Hartati, C. Dewi. "Pemikiran Konfusius Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Budaya Bangsa Tionghoa." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2021): 15–38.
- Krishna, Anand. *Mengikuti Irama Kehidupan; Tao Teh Ching Bagi Orang Modern*. 1st ed. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Kristan. *Pemikiran Politik Konfusius, Mencius Dan Xunzi*. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2015.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Sejarah Filsafat Tiongkok, Sebuah Pengantar Komperhensif*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Mattayang, Besse. "Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis." *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting* 2, no. 2 (2019): 45. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.247>.
- Meutia, Gieska Ayu, Pramesti Aprilianingrum, Tommy Kurniawan, and Riska Andi Fitriono. "Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2022): 19–24.
- Najib, Ainun. "Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia" 3, no. 1 (2013).
- Nugroho, Ari Cahyo. "Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)." *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021): 185–94. <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>.
- Peramesti, Ni Putu Depi Yulia, and Dedi Kusmana. "Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2018, 73–84. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.413>.
- Putri, Bilqis Lantika. "Ketidakadilan Penegak Hukum Di Indonesia." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, no. January (2022): 1–17.
- Rahayu, Kiki, Tonny D. Pariela, and Pieter H. Manuputty. "Kepemimpinan Dan Stabilitas Relasi-Relasi Sosial Di Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon."

- KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi* 5, no. 2 (2023): 128–36.
<https://doi.org/10.30598/komunitasvol5issue2page128-136>.
- Sanit, Arbi. “Pematangan Demokrasi Dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan Dan Kepemimpinan.” *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>.
- Saraswati, Retno. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif,” 2021, 137–43.
- Seow, Jeffrey. *Literatur Lengkap Ajaran Konfusius*. Edited by Lyndon Saputra. Batam: Lucky Publishers, 2002.
- Sriharmiati, Leni. “Relasi Kepemimpinan Dan Komunikasi Dengan Motivasi Kerja Di DKI Jakarta.” *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 1, no. 1 (2017): 21–29.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Pertama*. ALFABETA Bandung, 2022.
- Tjatur, Alphonsus, Paulinus Yan Olla, Yustinus. 2017. “Mengabdikan Tuhan Dan Mencintai Liyan : Penghayatan Agama Di Ruang Publik Yang Plural.” *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana* 27 seri no: 111,112.